

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap provinsi memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam mengelola dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik pada daerahnya. Tetapi sering terjadi penyalahgunaan oleh pemerintah daerah selama otonomi daerah berlangsung. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban pada daerah otonom yang dijalankan pemerintah kota dan kabupaten dalam mengatur maupun mengurus sendiri wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mensejahterahkan rakyat. Hal ini belum dijalankan dengan maksimal oleh pemerintahan kota atau kabupaten. Agar otonomi daerah bisa di jalankan dengan baik dan secara efektif maka diperlukan kejujuran agar tidak terjadinya kecurangan serta penyelewengan dalam proses pelaksanaannya. Untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan dalam pemerintahan daerah dapat diketahui dengan melakukan perhitungan melalui analisis rasio keuangan pemerintah dengan membandingkan hasil yang diperoleh dalam satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal walaupun sebagian besar daerah otonom (Kota/Kabupaten), mempunyai kemampuan yang masih sangat

minim dalam menghasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Walaupun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, namun diharapkan pada setiap daerah otonom untuk mengelola dengan baik seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerahnya sehingga meningkatnya penerimaan daerah akan berpengaruh dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana operasional keuangan daerah yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya untuk menjelaskan mengenai penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah.

Kinerja pemerintah daerah menjadi sorotan publik karena belum memberikan hasil yang baik untuk masyarakatnya. Masyarakat menuntut pemerintah daerah agar memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mewujudkan konsep otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang diperoleh daerah untuk memenuhi kebutuhannya yang akan mendukung berjalannya kegiatan dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan pada daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu”.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu”.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai penerapan teori anggaran mengenai penganggaran yang pernah dipelajari dan sangat bermanfaat untuk mengetahui yang sebenarnya dalam teori maupun praktek serta membantu penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasannya. Khususnya analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.

b. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola anggaran pendapatan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

c. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian bagi peneliti selanjutnya serta dapat mengkaji lebih lanjut tentang analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai penilaian kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu.

